

**PENERAPAN ACTIVITY BASED COSTING
PADA BANK PERKREDITAN RAKYAT
DALAM MENENTUKAN SUKU BUNGA KREDIT YANG TEPAT
(Studi Kasus pada PT BPR XYZ periode 2009)**

Oleh: Priyambudi Sujiwo Pratomo (200612060)

S-1 Akuntansi STIE Indonesia Bank School

ABSTRACT

In performing the intermediary function, bank engaged in fund raising and lending activities. Fund mobilization and lending activities by banks closely tied to interest rate, such as deposit interest rate and lending interest rate. Deposit interest rate is the yield for the storage of funds (depositors), while the lending rate is the bank of borrower's income funds (debtor). The process of setting interest rates is an essential process for banks, because the pricing errors can cause errors resulting in the decision making losses for banks. This study aimed to explore the possibilities of implementation of Activity Based Costing system in calculating the allocation of overhead costs to set interest rate loan product at PT BPR XYZ period in 2009.

The approach used in this study is a case study. The data collected by the primary data containing results of interviews and observations of PT BPR XYZ and secondary data from published financial statements of PT BPR XYZ period in 2009. Data collection methods used method of documentation, library research, and field studies.

Based on the analysis and discussion of the results obtained loan rate established by PT BPR XYZ at 30% for all loan products, while lending rates based on the calculation of overhead with Activity Based Costing system at 33.61% for consumer credit products and 31.55% for working capital loan products. If we compare traditional lending rate and ABC lending products, the research resulted in the difference 3.61% for consumer credit loan products and 1.55% for working capital loan products. The difference shows lending interest rates determined by PT BPR XYZ could not cover the entire cost of the bank, it can cause losses in 2009.

keywords: rural banks, lending rates, loan products, activity based costing

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia, kredit perbankan cenderung makin dominan sebagai sumber pembiayaan domestik ketimbang obligasi dan saham. Dominasi bank yang semakin besar bisa berdampak buruk karena bank tidak terpacu menawarkan bunga kredit yang lebih kompetitif (Kompas,23 Februari 2010). Terdapat dua metode penentuan harga pokok sebuah produk, yaitu metode penentuan harga pokok tradisional dan metode penentuan harga pokok produksi yang berdasarkan aktivitas atau dikenal dengan *Activity Based Costing* (ABC). Metode penentuan harga pokok tradisional merupakan metode yang mengalokasikan biaya tidak langsung dengan hanya menggunakan tarif tunggal biaya tidak langsung (Horngren dkk, 2009). metode tradisional dianggap tidak lagi mampu mencerminkan aktivitas yang spesifik sehingga menghasilkan biaya produk yang tidak akurat yang dapat mengakibatkan timbulnya *overcosting* atau *undercosting*. Kesalahan

penentuan suku bunga kredit dapat merugikan pihak bank dan juga nasabah/ debitur bank. Adanya kemungkinan kesalahan tersebut, maka perlu diterapkan sistem penentuan suku bunga kredit berdasarkan aktivitas atau *Activity Based Costing*. Pendekatan ini menggunakan *cost driver* pada aktivitas yang menimbulkan biaya dan akan lebih akurat bila diterapkan pada perusahaan yang menghasilkan beraneka ragam jenis produk serta sukar untuk mengidentifikasi biaya tersebut ke setiap produk secara individual.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Bagaimana metode penetapan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ?
- b. Bagaimana cara perhitungan suku bunga kredit dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem *Activity Based Costing* pada PT BPR XYZ?
- c. Apakah penerapan sistem ABC dapat menghasilkan penetapan suku bunga kredit yang tepat bagi PT BPR XYZ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Memahami metode penetapan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ
- b. Mengetahui cara perhitungan suku bunga kredit dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem *Activity Based Costing* pada PT BPR XYZ
- c. Membandingkan suku bunga kredit yang ditetapkan PT BPR XYZ dengan suku bunga kredit berdasarkan perhitungan alokasi biaya *overhead* dengan sistem *Activity Based Costing* untuk mengetahui kemampuan sistem ABC menghasilkan penetapan suku bunga kredit yang tepat bagi PT BPR XYZ.

II. LANDASAN TEORI

2.1 Bank

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Bank Perkreditan Rakyat

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat antara lain:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- b. Memberikan kredit;
- c. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

Kegiatan usaha yang dilarang dilakukan oleh bank umum antara lain:

- a. Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- b. Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing kecuali pedagang valuta asing (PVA);
- c. Melakukan penyertaan modal;
- d. Melakukan usaha perasuransian;
- e. Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang telah ditetapkan di atas.

2.2 Kredit

Menurut UU No. 10 tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Penentuan Tingkat Suku Bunga Kredit (*Loan Pricing*)

Loan pricing merupakan proses penentuan tingkat suku bunga yang akan dibebankan kepada debitur. Suku bunga kredit itu sendiri merupakan harga yang harus dibayar debitur karena meminjam dana dari bank (Rasyid, 1999). Beberapa unsur yang perlu diperhatikan oleh bank dalam penentuan suku bunga kredit yang akan dibebankan kepada para debitur antara lain:

a. Biaya Bunga (*cost of fund*)

Dalam Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) (2001) dijelaskan bahwa beban bunga adalah beban yang dibayarkan kepada nasabah atau pihak lain yang berkaitan dengan kegiatan penghimpunan dana.

b. *Cost of Loanable Fund*

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), *cost of loanable fund* yaitu biaya dana yang harus dikeluarkan atas dana yang diperoleh, setelah diperhitungkan dengan *reserve requirement* yang bersifat *idle* (tidak menghasilkan). Persamaan dari *Cost of Loanable Fund*:

$$COLF = \frac{\text{Cost of Fund}}{(1 - \text{Reserve Requirement})}$$

c. *Cost of Money*

Cost of Money (COM) merupakan penjumlahan total *Cost of Loanable Fund* dan biaya *overhead* (Siamat, 2005). Rumus perhitungan *cost of money* adalah:

$$COM = COLF + \text{biaya overhead}$$

d. *Biaya Overhead*

Menurut PAPI 2001, pengertian biaya *overhead* adalah berbagai beban yang timbul untuk mendukung kegiatan operasional bank. Menurut Lapoliwa dan Kuswandi (2000), terdapat beberapa ciri dari biaya *overhead* yang terjadi di bank sebagai berikut:

- 1) Tidak dapat diidentifikasi secara langsung dengan jasa yang dihasilkan, karena biaya yang dikeluarkan diperuntukan kegiatan bank,
- 2) Menjadi beban pada periode terjadinya, karena tidak ada biaya *overhead* untuk beberapa periode.
- 3) Biaya *overhead* yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat untuk masa yang akan datang.

e. Cadangan risiko kredit macet

Pencadangan aktiva produktif terhadap risiko kredit macet perlu dilakukan oleh bank, karena mengacu pada prinsip kehati-hatian yang diterapkan oleh Bank Indonesia bagi bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat, kualitas aktiva produktif dalam bentuk kredit ditetapkan dalam empat golongan yaitu Lancar, Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet. Tarif perhitungan cadangan dari keempat golongan kolektibilitas aktiva produktif tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) 0,5% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Lancar, tidak termasuk Surat Berharga Indonesia;
- 2) 10% dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan tiap debitur.
- 3) 50% dari dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Diragukan setelah dikurangi nilai agunan tiap debitur.
- 4) 100% dari dari aktiva produktif yang memiliki kualitas Macet setelah dikurangi nilai agunan tiap debitur.

f. Laba yang diinginkan

Menurut Bastian dan Suhardjono (2006), *spread* merupakan gambaran dari keuntungan yang ingin diperoleh dalam penyaluran pinjaman yang dikelola selama satu periode akuntansi.

g. Pajak

Pajak yaitu pajak yang dibebankan pemerintah kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya (Kasmir, 2003).

2.3 Biaya

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) (2001), beban (*expense*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada penanam modal.

Horngren (2009) berpendapat jenis biaya dapat diklasifikasikan atas dasar:

a. Perilaku

Berdasarkan perilaku biaya dapat dibedakan menjadi (1) biaya tetap, merupakan biaya yang berhubungan dengan produk, yang tetap untuk sejumlah unit. Maksudnya, biaya tetap sama berapapun jumlah unit tersebut diproduksi dan dijual; (2) biaya variabel, menunjukkan biaya pengeluaran oleh perusahaan yang akan berubah sesuai dengan tingkat kegiatan bisnis perusahaan.

b. Cara Penelusuran

Berdasarkan cara penelusuran, biaya dapat dibedakan menjadi (1) biaya langsung, merupakan biaya yang langsung terkait dengan produksi dan perubahan tingkat penjualan; (2) biaya tidak langsung, merupakan biaya yang bertalian dengan pengadaan pengeluaran untuk menyelenggarakan atau mendukung penelitian atau kegiatan-kegiatan-kegiatan lain dengan pendanaan luar tetapi tidak terkait langsung dengan suatu proyek spesifik.

Berdasarkan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat (2010) biaya bagi BPR terdiri atas biaya operasional dan biaya non operasional antara lain:

a. Biaya Operasional

yaitu semua beban yang dikeluarkan atas kegiatan yang lazim sebagai usaha BPR. Bentuk biaya operasional, diantaranya:

- 1) Biaya Bunga
- 2) Biaya *Overhead*
- 3) Biaya Penyisihan Kerugian
- 4) Biaya Pemasaran
- 5) Biaya Penelitian dan Pengembangan
- 6) Biaya Operasional Lainnya.

b. Biaya Non Operasional

yaitu semua beban yang berasal dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR. Beban non operasional antara lain adalah:

- 1) Kerugian yang timbul sebagai akibat dijual/hilangnya aset tetap dan inventaris milik BPR.
- 2) Denda/sanksi karena suatu pelanggaran.

2.4 Activity Based Costing

Menurut Horgren dkk (2009), *activity based costing is an approach to costing that focuses on individual activities as the fundamental cost object. It uses the costs of these activities as the basis for assigning cost to other cost objects such as products or services.* Manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan sistem ABC (Cooper dan Kaplan, 1991) dalam (Sudaryati, 1993) antara lain:

- a. Memperbaiki kualitas pengambilan keputusan;
- b. Perbaikan terus-menerus terhadap aktivitas untuk mengurangi biaya *overhead*;
- c. Memberikan kemudahan dalam penentuan biaya relevan.

Keterbatasan yang harus diperhatikan dari penerapan sistem ABC antara lain (Yulifah, 2000):

- a. Sistem ABC memerlukan biaya yang mahal, sehingga perusahaan yang akan menerapkan sistem ini perlu mempertimbangkan biaya dan manfaatnya (*cost and benefit*);
- b. Sistem ABC diperlukan oleh perusahaan yang memiliki diversifikasi produk yang tinggi, jika perusahaan hanya menghasilkan produk tunggal, penggunaan sistem ini tidak efisien, karena semua biaya yang terkait dengan produk merupakan biaya langsung.

2.4.1 Cost Driver

Menurut Glad dan Becker (1995), *cost driver can be defined as those factors or transactions that are significant determinant of cost.*

2.4.2 Pembebanan Biaya Overhead dengan Sistem ABC

Menurut Horngren (2009) pembebanan biaya *overhead* dengan sistem ABC melalui tujuh langkah penerapan sebagai berikut:

- a. Langkah 1 : Mengidentifikasi produk yang menjadi objek biaya;
- b. Langkah 2 : Mengidentifikasi biaya langsung dari produk;
- c. Langkah 3 : Memilih dasar alokasi biaya untuk mengalokasikan biaya tidak langsung;
- d. Langkah 4 : Mengidentifikasi biaya tidak langsung dihubungkan dengan masing-masing dasar alokasi biaya;
- e. Langkah 5 : Menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk;
- f. Langkah 6 : Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk;
- g. Langkah 7 : Menghitung total biaya produk dengan menjumlahkan seluruh biaya langsung dan biaya tidak langsung kepada produk.

2.5 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

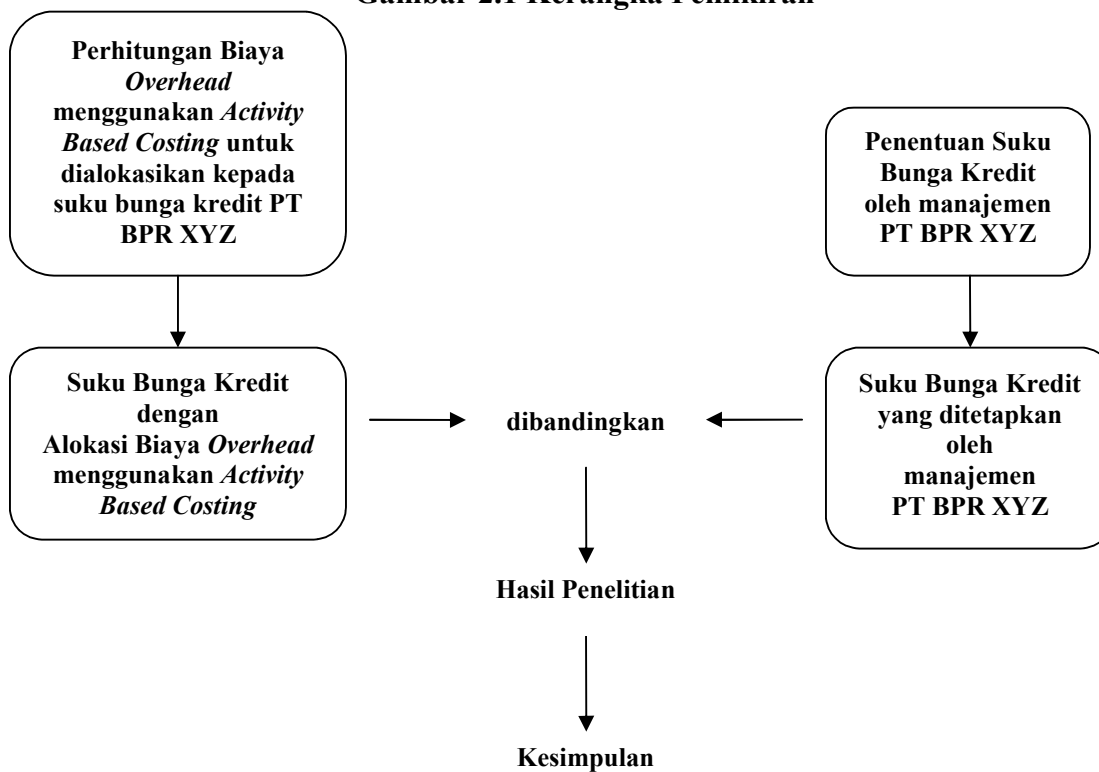
No	Peneliti	Tahun	Judul Penelitian
1	I Putu Sugiarta Sanjaya	2004	Penerapan <i>Activity Based Costing</i> (ABC) pada Sektor Jasa
2	Juaniva Sidharta dan Yessica	2008	Perbandingan Penerapan Metode Tradisional dengan Metode <i>Activity Based Costing</i> dalam Memperhitungkan Biaya Produksi

			pada Perusahaan XYZ
3	Abrar	1999	<i>Activity Based Costing System</i>
4	Erina Sudaryati	1993	<i>ABC System: Perlakuan Baru dalam Membebankan Biaya Overhead Pabrik</i>
5	Lilis Yulifah	2000	Penggunaan <i>Activity Based Costing</i> untuk Meningkatkan Keakuratan Perhitungan Biaya Produk.
6	Davood Askarany dan Hassan Yazdifar	2007	<i>Why ABC is Not Widely Implemented?</i>
7	Jerry Weiner	1996	<i>Activity Based Costing for Financial Institutions</i>
8	Linda Smith Bamber dan K.E Hughes II	2001	<i>Activity Based Costing in the Service Sector: The Buckeye National Bank</i>
9	Fieda Femala	2007	Penerapan Metode <i>Activity Based Costing System</i> Dalam Menentukan Besarnya Tarif Jasa Rawat Inap (Studi Pada RSUD Kabupaten Batang)

Sumber: Berbagai Sumber Penelitian

2.6 Kerangka Pemikiran

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pemilihan Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah PT BPR XYZ merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang telah berdiri sejak tahun 1989, dengan lokasi kantor di Jl. HOS Cokroaminoto No.52, Kreo, Ciledug, Tangerang. Pemilihan PT BPR XYZ sebagai objek penelitian karena PT BPR XYZ merupakan salah satu bank perkreditan rakyat yang belum menerapkan sistem *activity based costing* sebagai metode penentuan harga suku bunga kredit untuk alokasi biaya *overhead* dan mengalami kerugian pada tahun 2009.

3.2 Data yang akan Dihimpun

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Menurut Sekaran (2006), data primer merupakan data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Dalam penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari pejabat PT BPR XYZ. Data yang dihimpun berupa data biaya *overhead*, struktur organisasi, produk simpanan dan penyaluran kredit, dan data lain terkait dengan penelitian. Data sekunder merupakan data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada (Sekaran, 2006). Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan publikasi PT. BPR XYZ pada tahun 2009 yang diunduh melalui situs www.bi.go.id.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Metode Kepustakaan

Metode pengumpulan data dan literatur yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, jurnal, peraturan-peraturan, internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas terkait dengan penelitian. Metode penelitian ini digunakan sebagai sumber landasan teoritis bagi penelitian, sehingga penulis memiliki landasan teoritis yang kuat untuk mengaplikasikan teori pada permasalahan yang sebenarnya.

2. Metode Dokumentasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder sebagai pendukung data primer. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan publikasi PT BPR XYZ tahun 2009, untuk mendapatkan tambahan informasi mengenai biaya bagi bank.

3. Kajian Lapangan

Kajian lapangan yaitu pengumpulan data secara langsung pada bank yang menjadi objek penelitian. Adapun teknik yang digunakan dalam kajian lapangan ini antara lain:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara penulis dengan pejabat PT BPR XYZ.
- b. Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan secara langsung pada PT BPR XYZ untuk memperoleh data yang berkaitan dengan penelitian.

3.4 Metode Analisis Data

Pada penelitian ini, penulis mencoba menerapkan teori mengenai sistem ABC guna menetapkan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data mengenai biaya *overhead* pada PT BPR XYZ. Peneliti mencoba menerapkan data terkait dengan penelitian yang telah dikumpulkan dari PT BPR XYZ pada sistem ABC, dengan lebih menekankan pada biaya *overhead* pembentuk suku bunga kredit dan pengalokasian terhadap produk-produk kredit pada PT BPR XYZ. Langkah-langkah yang akan dilakukan penulis untuk menganalisis data penelitian antara lain sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian dengan melakukan wawancara, observasi, serta mengumpulkan data-data sekunder seperti laporan keuangan PT BPR XYZ.

- b. Mengkaji hasil kajian lapangan dengan maksud dari penelitian, yaitu melakukan perhitungan alokasi biaya *overhead* dengan sistem ABC terhadap penetapan suku bunga kredit kepada masing-masing produk kredit PT BPR XYZ.
- c. Melakukan perbandingan antara penetapan suku bunga kredit kepada masing-masing produk kredit yang ditetapkan PT BPR XYZ dengan suku bunga kredit berdasarkan perhitungan alokasi biaya *overhead* dengan sistem *Activity Based Costing*.
- d. Hasil dari penelitian dijadikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab pertanyaan dari penelitian.

IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Pendirian PT BPR XYZ disahkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. 02-6073.HT.01041992. Pada awal berdirinya PT BPR XYZ bermodal awal Rp 50 juta terus berkembang hingga saat ini. PT BPR XYZ yang memiliki slogan “Mengutamakan Pelayanan Cepat dan Saling Menguntungkan”, berlokasi kantor di Jl. HOS Cokroaminoto No. 52, Kreo, Ciledug, Tangerang.

4.2 Perhitungan Alokasi Biaya *Overhead* Terhadap Suku Bunga Kredit dengan ABC

Tabel 4.1 Realisasi Biaya Overhead PT BPR XYZ Tahun 2009

No.	Beban	Rp.
1	Beban Personalia	Rp306,899,000.00
2	Beban Premi Asuransi	Rp10,130,123.00
3	Beban Pajak	Rp6,880,877.00
4	Beban Pemeliharaan dan Perbaikan	Rp48,436,110.00
5	Beban Penyusutan Aktiva Tetap/Inventaris	Rp21,443,000.00
6	Beban Percetakan	Rp16,680,000.00
7	Beban Kendaraan dan Perjalanan	Rp49,074,100.00
8	Beban Kantor	Rp130,190,015.00
9	Beban Listrik, Telepon, dan Air	Rp110,210,775.00
10	Beban Lainnya	Rp50,927,000.00
Total Beban		Rp750,871,000.00

Sumber: PT BPR XYZ

Di bawah ini merupakan penjelasan dari beban/biaya yang terdapat pada PT BPR XYZ, antara lain:

- a. Beban Personalia merupakan beban pengeluaran berupa beban gaji, upah, dan honorarium, biaya pendidikan, dan biaya lain yang dibayarkan PT BPR XYZ kepada karyawan. Perincian gaji adalah 1 orang general manager sebesar Rp3,000,000, 1 orang manager marketing dan penyelesaian kredit, 8 orang marketing/kolektor,
- b. Beban Premi Asuransi meliputi beban pengeluaran atas asuransi aktiva tetap dan inventaris PT BPR XYZ. Selain itu beban premi asuransi juga termasuk biaya asuransi dana yang terdapat dalam khasanah bank dan juga asuransi jiwa debitur.
- c. Beban Pajak meliputi beban pajak aset tetap milik PT BPR XYZ (Pajak Bumi dan Bangunan) dan pajak penghasilan pegawai.
- d. Beban Pemeliharaan dan Perbaikan terkait biaya pemeliharaan dan perbaikan atas aset tetap dan inventaris milik PT BPR XYZ, meliputi biaya perawatan dan kebersihan kantor.
- e. Beban Penyusutan Aktiva Tetap/Inventaris merupakan beban depresiasi atau penurunan nilai dari aktiva tetap/inventaris milik PT BPR XYZ.

Tabel 4.2
Alokasi Jam Kerja Terhadap Aktivitas

Jabatan	Aktivitas									
	Kredit					Dana dan Umum				
	Pembukaan	Analisa	Administrasi	Pencairan	Penagihan	Akuntansi	Umum	Personalia	Internal Auditor	Dana
General Manager/Operasional		60%				10%		10%		20%
Manager Marketing dan Penyelesaian Kredit	10%	30%			50%					10%
Marketing/Kolektor	50%	10%			40%					10%
Adm.Kredit/ Umum dan Personalia			25%	25%			25%	25%		
CSO/Teller	30%			30%						40%
Akuntansi						100%				
Internal Auditor									100%	

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.3
Perhitungan Alokasi Beban Personalia terhadap Aktivitas Kredit

Jabatan	Kredit					Beban Personalia per Tahun	Jumlah Pegawai per Jabatan	Beban Personalia Aktivitas Kredit
	Pembukaan	Analisa	Administrasi	Pencairan	Penagihan			
General Manager/Operasional		60%				Rp36,000,000	1	Rp21,600,000
Manager Marketing dan Penyelesaian Kredit	10%	30%			50%	Rp36,000,000	1	Rp32,400,000
Marketing/Kolektor	40%	10%			40%	Rp20,362,380	8	Rp146,609,136
Adm.Kredit/Umum dan Personalia			25%	25%		Rp18,000,000	1	Rp9,000,000
CSO/Teller	30%			30%		Rp18,000,000	1	Rp10,800,000
Akuntansi						Rp18,000,000	1	Rp0
Internal Auditor						Rp18,000,000	1	Rp0
Total	Rp74,159,616	Rp48,689,904	Rp4,500,000	Rp9,900,000	Rp83,159,616			Rp220,409,136

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.4
Perhitungan Alokasi Beban Personalia terhadap Aktivitas Dana dan Umum

Jabatan	Dana dan Umum					Beban Personalia per Tahun	Jumlah Pegawai per Jabatan	Beban Personalia Aktivitas Kredit
	Akuntansi	Umum	Personalia	Internal Auditor	Dana			
General Manager/Operasional	10%		10%		20%	Rp36,000,000	1	Rp14,400,000
Manager Marketing dan Penyelesaian Kredit					10%	Rp36,000,000	1	Rp3,600,000
Marketing/Kolektor					10%	Rp20,362,380	8	Rp16,289,904
Adm.Kredit/Umum dan Personalia		25%	25%			Rp18,000,000	1	Rp9,000,000
CSO/Teller					40%	Rp18,000,000	1	Rp7,200,000
Akuntansi	100%					Rp18,000,000	1	Rp18,000,000
Internal Auditor				100%		Rp18,000,000	1	Rp18,000,000
Total	Rp21,600,000	Rp4,500,000	Rp8,100,000	Rp18,000,000	Rp34,289,904			Rp86,489,904

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Selanjutnya penulis melakukan pengelompokan beban (*cost pool*) yang didasarkan pada proporsi beban terhadap aktivitas. Tabel 4.5 menjelaskan rincian biaya per aktivitas.

Tabel 4.5 Cost Pool per Aktivitas

No	Proses Inti	Aktivitas
1	Kredit	Pembukaan
		Beban Personalia Rp74,159,616
		Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820
		Cost Pool Aktivitas Pembukaan Rp83,974,436
		Analisa
		Beban Personalia Rp48,689,904
		Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820
		Cost Pool Aktivitas Analisa Rp58,504,724
		Administrasi
		Beban Personalia Rp4,500,000
		Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820
		Cost Pool Aktivitas Administrasi Rp14,314,820
		Pencairan
		Beban Personalia Rp9,900,000
Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820		
Cost Pool Aktivitas Pencairan Rp19,714,820		
Penagihan		
Beban Personalia Rp83,159,616		
Kendaraan dan Perjalanan Rp9,814,820		
Cost Pool Aktivitas Penagihan Rp92,974,436		
2	Dana dan Umum	Akuntansi
		Beban Personalia Rp21,600,000
		Cost Pool Aktivitas Akuntansi Rp21,600,000
		Umum
		Beban Personalia Rp4,500,000
		Beban Pemeliharaan dan Perbaikan Rp48,436,110
		Beban Penyusutan Aktiva Tetap/Inventaris Rp21,443,000
		Beban Pajak Rp6,880,877
		Beban Kantor Rp130,190,015
		Beban Listrik, Air dan Telepon Rp110,210,775
		Beban Premi Asuransi Rp10,130,123
		Beban Percetakan Rp16,680,000
		Beban Lainnya Rp50,927,000
		Cost Pool Aktivitas Umum Rp399,397,900
		Personalia
		Beban Personalia Rp8,100,000
		Cost Pool Aktivitas Personalia Rp8,100,000
Internal Auditor		
Beban Personalia Rp18,000,000		
Cost Pool Aktivitas Internal Auditor Rp18,000,000		
Dana		
Beban Personalia Rp34,289,904		
Cost Pool Aktivitas Dana Rp34,289,904		

Tabel 4.6 Data Dasar Alokasi Biaya per Objek Biaya

No	Aktivitas	Dasar Alokasi Biaya	Dasar Alokasi Biaya Produk Kredit Konsumtif	Dasar Alokasi Biaya Produk Kredit Modal Kerja	Kuantitas Dasar Alokasi Biaya
1	Pembukaan	jumlah pengajuan kredit	708	130	838
	Analisa	jumlah pengajuan kredit	708	130	838
	Administrasi	jumlah pengajuan kredit	708	130	838
	Pencairan	jumlah rekening kredit	673	106	779
	Penagihan	jumlah rekening kredit	673	106	779
2	Akuntansi	jam kerja	11769	18831	30600
	Umum	proporsi per produk			
	Personalialia	jam kerja	11769	18831	30600
	Internal Auditor	jam kerja	11769	18831	30600
	Dana	jam kerja	11769	18831	30600

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Data total kuantitas dasar alokasi biaya diperoleh dari perhitungan sebagai berikut:

Jam kerja = $170^* \times 12^{**} \times 15^{***}$

170* merupakan jumlah jam kerja dalam 1 bulan beserta jam kerja tambahan (lembur)

12** merupakan jumlah bulan dalam 1 tahun

15** merupakan jumlah keseluruhan pegawai PT BPR XYZ

Alokasi dasar alokasi biaya pada masing-masing produk diatas diperoleh dari perhitungan di bawah ini:

- Pada aktivitas yang terkait dengan proses kredit menggunakan dasar alokasi biaya berupa jumlah pengajuan kredit dalam setahun dan jumlah rekening kredit yang diterima oleh BPR.
- Pada aktivitas umum pengalokasian biaya dilakukan secara merata bagi masing-masing produk, karena PT BPR XYZ tidak melakukan pengalokasian secara mendetail terhadap masing-masing produk. Selain itu sifat dari aktivitas umum merupakan aktivitas penopang (*sustaining activities*) bagi kegiatan operasional BPR.
- Pada aktivitas akuntansi, personalialia, *internal auditor*, dan dana dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam proses kredit per produk.
 - Kredit konsumtif membutuhkan rata-rata 5 hari dalam proses kredit
 - Kredit modal kerja membutuhkan rata-rata 8 hari dalam proses kredit
 sehingga perhitungan alokasi dasar alokasi biaya per masing-masing produk sebagai berikut:
 - Dasar alokasi biaya produk kredit konsumtif = $30600 \times 5/(5+8) = 11769$
 - Dasar alokasi biaya produk kredit modal kerja = $30600 \times 8/(5+8) = 18831$

4.2.4 Mengidentifikasi biaya tidak langsung yang terkait dengan masing-masing dasar alokasi biaya

Tabel 4.7 Data Dasar Alokasi Biaya per Aktivitas

No	Proses Inti	Aktivitas	Biaya Tidak Langsung	Dasar Alokasi Biaya	Kuantitas Dasar Alokasi Biaya
1	Kredit	Pembukaan	Rp83,974,436	jumlah pengajuan kredit	838
		Analisa	Rp58,504,724	jumlah pengajuan kredit	838
		Administrasi	Rp14,314,820	jumlah pengajuan kredit	838
		Pencairan	Rp19,714,820	jumlah rekening kredit	779
		Penagihan	Rp92,974,436	jumlah rekening kredit	779
2	Dana dan Umum	Akuntansi	Rp21,600,000	jam kerja	30600
		Umum	Rp399,397,900	proporsi per produk	
		Personalia	Rp8,100,000	jam kerja	30600
		Internal Auditor	Rp18,000,000	jam kerja	30600
		Dana	Rp34,289,904	jam kerja	30600

Sumber: Hasil Olahan Penulis

4.2.5 Menghitung tarif per unit dari masing-masing dasar alokasi biaya yang digunakan untuk mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk

Tabel 4.8 Perhitungan Tarif per Unit Biaya Tidak Langsung

No	Proses Inti (1)	Aktivitas (2)	Biaya Tidak Langsung (3)	Dasar Alokasi Biaya (4)		Tarif/Unit (5)=(3)/(4)
1	Kredit	Pembukaan	Rp83,974,436	838	jumlah pengajuan kredit	Rp100,208
		Analisa	Rp58,504,724	838	jumlah pengajuan kredit	Rp69,815
		Administrasi	Rp14,314,820	838	jumlah pengajuan kredit	Rp17,082
		Pencairan	Rp19,714,820	779	jumlah rekening kredit	Rp25,308
		Penagihan	Rp92,974,436	779	jumlah rekening kredit	Rp119,351
2	Dana dan Umum	Akuntansi	Rp21,600,000	30600	jam kerja	Rp706
		Umum	Rp399,397,900		proporsi per produk	
		Personalia	Rp8,100,000	30600	jam kerja	Rp265
		Internal Auditor	Rp18,000,000	30600	jam kerja	Rp588
		Dana	Rp34,289,904	30600	jam kerja	Rp1,121

Sumber: Hasil Olahan Penulis

4.2.6 Menghitung biaya tidak langsung yang dialokasikan ke produk

Tabel 4.9 Perhitungan Biaya Tidak Langsung Produk Kredit Konsumtif

No (1)	Aktivitas (2)	Tarif/Unit (3)	Dasar Alokasi Biaya Produk Kredit Konsumtif (4)	Total (5)=(3)*(4)
1	Pembukaan	Rp100,208	708	Rp70,947,376
	Analisa	Rp69,815	708	Rp49,428,812
	Administrasi	Rp17,082	708	Rp12,094,144

	Pencairan	Rp25,308	673	Rp17,032,187
	Penagihan	Rp119,351	673	Rp80,323,229
2	Akuntansi	Rp706	11769	Rp8,307,692
	Umum			Rp199,698,950
	Personalia	Rp265	11769	Rp3,115,385
	Internal Auditor	Rp588	11769	Rp6,923,077
	Dana	Rp1,121	11769	Rp13,188,425
Total Biaya Kredit Konsumtif				Rp461,059,276

Sumber: Hasil Olahan Penulis

Tabel 4.10 Perhitungan Biaya Tidak Langsung Produk Kredit Modal Kerja

No	Aktivitas	Tarif/Unit	Dasar Alokasi Biaya Produk Kredit Modal Kerja	Total
1	Pembukaan	Rp100,208	130	Rp13,027,060
	Analisa	Rp69,815	130	Rp9,075,912
	Administrasi	Rp17,082	130	Rp2,220,676
	Pencairan	Rp25,308	106	Rp2,682,633
	Penagihan	Rp119,351	106	Rp12,651,207
2	Akuntansi	Rp706	18831	Rp13,292,308
	Umum			Rp199,698,950
	Personalia	Rp265	18831	Rp4,984,615
	Internal Auditor	Rp588	18831	Rp11,076,923
	Dana	Rp1,121	18831	Rp21,101,479
Total Biaya Kredit Modal Kerja				Rp289,811,764

Sumber: Hasil Olahan Penulis

4.2.7 Mengalokasikan biaya tidak langsung setiap produk terhadap suku bunga kredit

Pada tahap ini penulis melakukan alokasi biaya tidak langsung yang dikonsumsi setiap per produk terhadap suku bunga kredit. Menurut Suyatno dkk (2007) mengungkapkan cara perhitungan alokasi biaya tidak langsung/*overhead* dengan rumus:

$$\text{Overhead Cost} = \frac{\text{Total Biaya (non bunga)}}{\text{Total Earning Assets}}$$

Data aktiva produktif sebesar Rp 2.716.064.000,- diperoleh dari akumulasi kredit yang diberikan sebesar Rp 2.612.408.000,- dan penempatan pada bank lain sebesar Rp 103.656.000,-.

Tabel 4.11 Perhitungan Alokasi Biaya *Overhead* per Produk

Produk Kredit (1)	Biaya Overhead (ABC) (2)	Aktiva Produktif (3)	Alokasi Biaya Overhead (4)=(2) / (3)
Kredit Konsumtif	Rp461,059,276.00	Rp2,716,064,000.00	16.98%
Kredit Modal Kerja	Rp289,811,764.00	Rp2,716,064,000.00	10.67%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

4.3 Perhitungan Suku Bunga Kredit dengan Alokasi Biaya *Overhead* Hasil ABC

Dalam menentukan suku bunga kredit bank perlu memperhitungkan unsur pembentuk suku bunga kredit, yaitu:

a. *Cost of Loanable Fund*.

Tabel 4.12 Perhitungan *Cost of Loanable Fund*

Sumber Dana	Jumlah Dana	Komposisi Dana	Tingkat Bunga Rata-Rata	Cash Ratio	Bunga Efektif	Kontribusi Biaya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)/(100%-3%)	(7)=(3)*(6)
Tabungan	Rp237,835.00	49.83%	10%	3%	10.31%	5.14%
Deposito Berjangka	Rp239,500.00	50.17%	10%	3%	10.31%	5.17%
	Rp477,335.00	100.00%				10.31%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

b. Cadangan Risiko Kredit Macet

Tabel 4.13 Perhitungan Risiko Kredit Macet

Produk	PPAP	Kredit yang Diberikan	Risiko Kredit
Kredit Modal Kerja	Rp223,970,789	Rp2,612,408,000	8.57%
Kredit Konsumtif	Rp112,727,481	Rp2,612,408,000	4.32%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

c. Biaya *Overhead*

Berdasarkan perhitungan sebelumnya diperoleh data alokasi biaya *overhead* untuk setiap produk yaitu produk kredit konsumtif sebesar 16.98% dan produk kredit modal kerja sebesar 10.67%.

d. Laba yang Diinginkan

Besar kecilnya unsur laba yang diinginkan didasarkan pada kebijakan pada manajemen PT BPR XYZ yaitu berkisar antara 2% hingga 5%. Kondisi calon debitur, khususnya eksposur risiko bagi BPR merupakan faktor yang dipertimbangkan oleh PT BPR XYZ dalam menentukan alokasi laba yang diinginkan, maksudnya semakin rendah risiko kredit debitur maka alokasi laba yang diinginkan semakin rendah, sebaliknya semakin tinggi risiko kredit debitur maka alokasi laba yang diinginkan semakin tinggi.

e. Pajak

Unsur terakhir adalah pajak, yaitu pembebanan pajak atas penentuan laba yang diinginkan sebagai unsur pembentuk suku bunga kredit.

Berdasarkan unsur pembentuk suku bunga kredit di atas, tabel 4.14 di bawah ini menjelaskan alokasi tiap unsur pembentuk kredit terhadap suku bunga kredit PT BPR XYZ dengan asumsi calon debitur merupakan calon debitur dengan risiko kredit rendah dan menguntungkan sehingga PT BPR XYZ tidak membebankan pajak.

Tabel 4.14 Perhitungan Suku bunga Kredit

No.	Pembentuk Kredit	Kredit	
		Konsumtif	Modal Kerja

1	<i>Cost of Loanable Fund</i>	10.31%	10.31%
2	Cadangan Resiko Kredit Macet	4.32%	8.57%
3	Alokasi <i>Overhead Cost</i>		
	a. Kredit Konsumtif*	16.98%	
	b. Kredit Modal Kerja**		10.67%
4	Laba yang Diinginkan	2.00%	2.00%
5	Pajak	0.00%	0.00%
Suku Bunga Kredit		33.61%	31.55%

Sumber: Hasil Olahan Penulis

4.4 Perbandingan Suku Bunga Kredit pada PT BPR XYZ dengan Suku Bunga Kredit melalui Perhitungan ABC

Bila dibandingkan antara suku bunga kredit ABC sebesar 33.61% untuk produk kredit konsumtif dan 31.55% untuk produk kredit modal kerja dengan suku bunga kredit tradisional sebesar 30% untuk semua produk kredit diperoleh adanya perbedaan pada suku bunga konsumtif sebesar 3.61% (*undercosting*) dan suku bunga kredit modal kerja sebesar 1.55% (*undercosting*). Data menunjukkan bahwa suku bunga kredit yang ditetapkan oleh manajemen PT BPR XYZ tidak mampu menutupi seluruh biaya bank, keadaan tersebut menyebabkan PT BPR XYZ mengalami kerugian pada tahun yang diteliti. PT BPR XYZ menerapkan suku bunga kredit hanya berdasarkan asumsi kebijakan manajemen yaitu dengan mempertimbangkan kondisi calon debitur, suku bunga pesaing, dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi penentuan suku bunga.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis di PT BPR XYZ, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. PT BPR XYZ menerapkan suku bunga kredit berdasarkan asumsi kebijakan manajemen yaitu dengan mempertimbangkan kondisi calon debitur, suku bunga pesaing, dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi penentuan suku bunga.
2. Perhitungan biaya *overhead* dengan menggunakan sistem ABC dilakukan dengan mengaplikasikan tujuh langkah yang dikemukakan oleh (Horngren, 2009). Pada dasarnya pengimplementasian ABC didahului dengan menelusuri konsumsi sumber daya oleh aktivitas yang menimbulkan biaya dan selanjutnya pembebanan biaya aktivitas ke produk. Berdasarkan hasil perhitungan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem ABC diperoleh suku bunga kredit konsumtif adalah 33.61% dan suku bunga kredit modal kerja sebesar 31.55%.
3. Apabila dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan suku bunga kredit pada PT BPR XYZ dengan alokasi biaya *overhead* menggunakan sistem ABC dan metode tradisional, diperoleh suku bunga kredit dengan metode ABC yang lebih besar daripada suku bunga kredit tradisional. Selisih sebesar 3.61% pada suku bunga konsumtif dan suku bunga kredit modal kerja sebesar 1.55%, menunjukkan suku bunga kredit yang ditetapkan oleh manajemen PT BPR XYZ tidak mampu menutupi seluruh biaya bank, keadaan tersebut menyebabkan PT BPR XYZ mengalami kerugian pada tahun yang diteliti. Perbedaan tersebut disebabkan karena pembebanan

biaya *overhead* pada suku bunga kredit masing-masing produk, pada metode penetapan suku bunga kredit tradisional hanya didasarkan pada asumsi kebijakan manajemen yang mempertimbangkan kondisi calon debitur, kondisi suku bunga pesaing, dan faktor eksternal lain yang mempengaruhi penentuan suku bunga, sedangkan pada metode penetapan suku bunga kredit dengan sistem ABC, biaya *overhead* pada masing-masing produk dibebankan pada banyak *cost driver* yang menggambarkan konsumsi sumber daya aktivitas.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil perhitungan alokasi biaya *overhead* dengan sistem ABC terhadap penetapan suku bunga kredit PT BPR XYZ, diharapkan PT BPR XYZ perlu untuk mempertimbangkan untuk menggunakan sistem ABC sebagai metode perhitungan suku bunga kredit, namun tetap memperhatikan suku bunga kredit yang ditetapkan oleh pesaing dan kemampuan masyarakat sebagai debitur PT BPR XYZ yang tidak dipungkiri juga mempengaruhi penetapan suku bunga kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar. 1999. "Activity Based Costing System: Sistem Alokasi Biaya Overhead dalam Industri Modern". Jurnal Ekonomi KIAT. Vol I No. 4 Tahun 1999 Hal 60-71. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Askarany, Davood dan Hassan Yazdifar. 2007. "*Why ABC is Not Widely Implemented?*". *International Journal of Business Research. Volume VII Number 1.*
- Bamber, Linda Smith dan K.E Hughes II. 2001. "Activity Based Costing in the Service Sector: The Buckeye National Bank". Accounting Education. Volume XVI No.3.
- Bastian, Indra dan Suhardjono. 2006. *Akuntansi Perbankan Buku 2*. Edisi Pertama. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Femala, Fieda. 2007. "Penerapan Metode Activity Based Costing System Dalam Menentukan Besarnya Tarif Jasa Rawat Inap (Studi pada RSUD Kabupaten Batang)". Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Finoza, Lamuddin. 2008. *Komposisi Bahasa Indonesia*. Cetakan ke 16. Jakarta: Penerbit Diksi Insan Mulia.
- Helms, Brigit dan Lorna Grace. 2004. "*Microfinance Product Costing Tool*". *Technical Tools Series No.6. Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)/ The World Bank Group.*
- Helms, Brigit. 1998. "*Cost Allocation for Multi-Service Micro-Finance Institutions*". *Consultative Group to Assist the Poor (CGAP)*
- Horngren, Charles T., dkk. 2009. *Cost Accounting: A Managerial Emphasis*. 13th edition. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Kasmir. 2002. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan ke 2. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lapoliwa, N. dan Kuswandi, Daniel S. 2000. *Akuntansi Perbankan: Akuntansi Transaksi Bank Dalam Valuta Rupiah Jilid 1*. Edisi ke 5. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Muljono, Teguh Pudjo. 1991. *Bank Auditing: Petunjuk Pemeriksaan Intern Bank*. Cetakan ke 3. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Mulyadi. 1984. *Akuntansi Biaya Untuk Manajemen*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.

- Peraturan Bank Indonesia No. 11/20/PBI/2009 Tahun 2009 tentang Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Bank Perkreditan Rakyat Dalam Status Pengawasan Khusus.
- Peraturan Bank Indonesia No. 6/22/PBI/2004 Tahun 2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Perkreditan Rakyat.
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 Tahun 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat
- Rasyid, Rosmita. 1999. "Sulitnya Menurunkan Suku Bunga Kredit Bank". Jurnal Ekonomi Universitas Tarumanegara. Vol IV No. 1 Tahun 1999 Hal 60-67. Fakultas Ekonomi Universitas Tarumanegara.
- Sanjaya, I Putu Sugiarta. 2004. "Penerapan Activity Based Costing (ABC) pada Sektor Jasa". Jurnal Ekonomi. Vol XIV No. 38 Tahun 2004 Hal 7-15. Fakultas Ekonomi Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan: Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi ke 5. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Sidharta, Juaniva dan Yessica. 2008. "Perbandingan Penerapan Metode Tradisional dengan Metode *Activity Based Costing* dalam Memperhitungkan Biaya Produksi pada Perusahaan XYZ". Buletin Ekonomi. Vol. XII No.2.
- Siswanto, 2004. "Activity Based Costing Sebagai Metode Alternatif Meraih Keunggulan Kompetitif". Jurnal Pendidikan Akuntansi Indonesia. Vol. III No.1-Tahun 2004 Hal 71-77. Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sudaryati, Erina. 1993. "ABC System: Perlakuan Baru dalam Membebaskan Biaya Overhead Pabrik". Majalah Ekonomi. Vol III No. 9-10 Tahun 1993 Hal 40-45. Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Surat Edaran No. 8/30/DPBR tahun 2006 perihal Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Perkreditan Rakyat
- Suyatno, Thomas, dkk. 2007. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Edisi Keempat. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama
- SW, Suprihatmi. 2003. "Alternatif Activity Based Costing dalam Menentukan Harga Pokok Produksi yang Akurat". Jurnal Ekonomi dan Kewirausahaan Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Fakultas Ekonomi Universitas Slamet Riyadi Surakarta.
- Tim Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat. 2010. *Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bank Indonesia kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia
- Tim Penyusun Pedoman Akuntansi Perbankan. 2001. *Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia Revisi 2001*. Cetakan Pertama. Jakarta: Bank Indonesia kerjasama dengan Ikatan Akuntan Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta Penjelasannya.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 beserta Penjelasannya.

Yulifah, Lilis. 2000. "Penggunaan Activity Based Costing Untuk Meningkatkan Keakuratan Penghitungan Biaya Produk". *Kinerja Universitas Islam Bandung*. Vol II No. 1 Tahun 2000 Hal 43-56. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung.